



WALI KOTA BANJARBARU

Banjarbaru, 20 Oktober 2025

Nomor : 900.1/1473-SET/X/BPKAD/2025
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Klarifikasi Data Kas Daerah
Pemerintah Kota Banjarbaru

Kepada Yth.

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia
2. Gubernur Bank Indonesia

di –

Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rilis data yang disampaikan Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah pada tanggal 20 Oktober 2025, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru memiliki simpanan dana sebesar Rp3.180.500.000.000,00 (tiga triliun seratus delapan puluh miliar lima ratus juta rupiah) hingga Desember 2024, dan Rp5.165.900.000.000,00 (lima triliun seratus enam puluh lima miliar sembilan ratus juta rupiah) hingga September 2025, dengan ini kami sampaikan klarifikasi bahwa data tersebut tidak sesuai dengan kondisi kas sebenarnya di Pemerintah Kota Banjarbaru.

Berdasarkan hasil *cash opname* mandiri yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru sampai dengan tanggal 10 Oktober 2025, tercatat total rekening kas pemerintah daerah hanya sebesar Rp791.252.333.243,26 (tujuh ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah dua puluh enam sen) dengan rekening koran terlampir. Perbedaan angka tersebut diduga berasal dari konsolidasi data perbankan yang belum terverifikasi, sehingga tidak menggambarkan secara akurat posisi kas Pemerintah Kota Banjarbaru yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia berkenan memberikan penjelasan mengenai komponen simpanan dana yang di maksud dalam materi rapat tersebut, dan melakukan verifikasi ulang / penyesuaian data resmi, agar tidak menimbulkan persepsi publik yang kurang tepat terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Banjarbaru.

Surat klarifikasi ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam penyajian data keuangan daerah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menjamin keakuratan informasi fiskal daerah, sekaligus menjadi dasar yang obyektif dalam penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) kepada Pemerintah Kota Banjarbaru di Tahun Anggaran mendatang sehingga pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru dapat berkesinambungan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.


WALI KOTA BANJARBARU,
Hj. ERNA LISA HALABY

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Gubernur Kalimantan Selatan
3. Arsip